

Peran Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat dalam Implementasi Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata)

Prayogi Aprilianto¹ Lukman Yudho Prakoso²

Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Kabupaten Bogor, provinsi Jawa Barat, Indonesia^{1,2}

Email: prayogiaprilianto@gmail.com¹ lukman.prakoso@idu.ac.id²

Abstrak

Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan untuk perlindungan segeap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Berangkat dari dasar-dasar Konstitusi Indonesia, dibentuklah sebuah sistem pertahanan, yang biasa disebut Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata). Sishankamrata merupakan konsep yang bersifat semesta dengan melibatkan kekuatan rakyat sebagai komponen cadangan dan pendukung pertahanan negara. Salah satu aspek yang sangat penting dalam pancagarta yang dianut dalam konsep mobilisasi rakyat semesta adalah ekonomi. Ekonomi memegang peranan penting dalam menunjang kesejahteraan masyarakat secara luas sehingga terciptanya keamanan dan ketentraman. Pertahanan negara yang kuat harus didukung oleh ekonomi yang kuat, sehingga peran ekonomi tidak dapat dipisahkan dalam mendukung pertahanan negara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan dari pertumbuhan ekonomi pada implementasi sistem pertahanan rakyat semesta (Sishankamrata). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitin model deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan sebagai sumber data utama yaitu data sekunder yang diperoleh dari literatur-literatur referensi berupa buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah dan artikel-artikel yang berkaitan dengan topik pembahasan pada penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ekonomi memiliki peranan penting dalam implementasi Sishankamrata. Dalam implementasinya sendiri Sishankamrata memiliki permasalahan yaitu kurang berkualitasnya sumber daya masnusi dan lemahnya ekonomi di Indonesia. Pada permasalahan pertama, ekonomi dapat membawa pengaruh positif pada perbaikan sumberdaya manusia dan selanjutnya menunjang implementasi Sishankamrata. Berperan pertumbuhan ekonomi dapat menstimulus untuk meningkatkan pembangunan di sektor-sektor lain seperti pendidikan dan kesehatan, serta sebagai kekuatan utama untuk mengatasi kesenjangan sosial ekonomi. Selanjutnya Pada permasalahan kedua, untuk mengatasi lemahnya ekonomi Indonesia peran pertumbuhan ekonomi adalah untuk mendorong peningkatan pendapatan dan merangsang Bergeraknya ekonomi kelas bawah melalui subsisidi atau insentif dari pemerintah. Ekonomi menjadi instrumen dasar dalam memperkuat sendi-sendi Sishankamrata sebagai sistem pertahanan Indonesia. Ekonomi mendorong terwujudnya Sishankamrata yang lebih partisipatif dan berkualitas.

Kata Kunci: Sishankamrata, Ekonomi, Pertahanan, Sumber Daya Nasional, dan Disparitas

Abstract

The 1945 Constitution has mandated the protection of the entire Indonesian nation and all Indonesian blood spilled. Departing from the basics of the Indonesian Constitution, a defense system was formed, commonly called the Universal People's Defense and Security System (Sishankamrata). Sishankamrata is a concept that is universal in nature by involving people's power as a reserve and supporting component of national defense. One very important aspect of the pancagarta adopted in the concept of universal people's mobilization is the economy. The economy plays an important role in supporting the welfare of the community at large so as to create security and peace. A strong national defense must be supported by a strong economy, so the role of the economy cannot be separated in supporting national defense. The research method used in this research is a descriptive model research method with a qualitative approach.

This research uses the literature study method as the main data source, namely secondary data obtained from reference literature in the form of books, research results, scientific journals and articles related to the topic of discussion in this study. The results of this study indicate that the influence of the economy in improving the implementation of Sishankamrata. In its own implementation, Sishankamrata has problems, namely the lack of quality of human resources and the weak economy in Indonesia. In the first problem, the economy can have a positive influence on the improvement of human resources and further support the implementation of Sishankamrata. Economic growth can stimulate development in other sectors such as education and health, as well as being a major force to overcome socio-economic disparities. Furthermore, in the second problem, to overcome the weakness of the Indonesian economy, one of the real solutions provided by the government is the provision of subsidies or assistance to the community. The function of this subsidy is to stimulate the lower-class economy to develop so that it can reduce economic disparities. The economy is a basic instrument in strengthening the joints of Sishankamrata as Indonesia's defense system. The economy encourages the realization of a more participatory and quality Sishankamrata.

Keywords: *Sishankamrata, Economy, Defense, National Resources, and Disparities*



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Indonesia sudah banyak diakui sebagai negara dengan kepulauan terbesar di seluruh dunia. Berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (2023), jumlah pulau di Indonesia mencapai 16.771 yang membentang mulai dari ujung barat sampai ke timur yaitu dari Sabang sampai Merauke. Sumatra Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Papua merupakan pulau utama di Indonesia yang menjadi pulau-pulau yang ditinggali oleh mayoritas penduduk Indonesia. Populasi Indonesia adalah yang terbesar di dunia dengan total populasi 275.773,8 ribu jiwa, menjadikannya yang terbesar keempat di dunia setelah Tiongkok, India dan Amerika Serikat (BPS, 2023). Bangsa Indonesia terdiri dari kurang lebih 300 suku, termasuk Batak, Sunda, Jawa, Tionghoa, Papua dan Dayak. Secara total, lebih dari 360 dialek mewarnai budaya Indonesia, karena setiap suku memiliki dialektanya tersendiri (Rusfiana, 2021). Indonesia memiliki potensi yang besar dalam segi geografis dan demografis yang dapat digunakan sebagai kekuatan bangsa dalam menjaga pertahanan dan ketahanan negara.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menguatkan tekad bangsa Indonesia untuk mewujudkan tujuan nasionalnya. Pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Alinea keempat Tahun 1945 menyatakan: *"Membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia."*

Lebih lanjut, Pasal 30 (2) UUD 1945 menyatakan 1 Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishakamurata) bukan hanya meliputi komponen utama TNI dan POLRI, tetapi juga seluruh masyarakat dan wilayah serta sumber daya nasional lainnya dalam fungsinya menghadapi berbagai macam ancaman. Oleh karena pandangan pragmatis terhadap keamanan internasional bersifat pesimis, bagi kaum pragmatis, menjaga dan mempertahankan keamanan nasional menjadi prioritas utama pemerintah untuk menopang kehidupan negara dan warganya (Akmal & Pazli, 2015). Salah satu cara untuk menjaga pertahanan negara adalah dengan memaksimalkan potensi sumber daya manusia. Sumber daya manusia Indonesia yang melimpah dapat digunakan sebagai kekuatan pertahanan yang mencakup keseluruhan individu negara.

Berangkat dari dasar-dasar Konstitusi Indonesia, sebuah sistem pertahanan, yang biasa disebut Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta, yang biasa disebut Sishankamrata,

dibentuk untuk menjalankan tugasnya. Sistem ini diprioritaskan pada kekuatan untuk menjaga kemerdekaan dan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia, serta menjamin Kesatuan wilayah NKRI dan berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan nasional dengan menggunakan seluruh kekuatan nasional. Sebuah upaya untuk memobilisasi secara terpadu. Ini adalah tujuan yang aman (Setiyawan, 2020). Sishankamrata tidak dapat dipisahkan dari sifatnya yang universal. Kekuatan Sishankamrata dapat diukur dengan seberapa tingkatan dari "militansi rakyat" dan potensinya, serta kekuatan yang secara riil yang ada di daerah tersebut. Komponen dasar Sishankamrata adalah rakyat terlatih yang berfungsi untuk ketertiban masyarakat, perlindungan masyarakat, keamanan masyarakat, dan perlawanan rakyat yang diupayakan melalui mobilisasi. TNI sebagai lembaga utama berfungsi sebagai subjek kekuatan sosial, keamanan dan pertahanan negara. Komponen khusus adalah Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang memiliki fungsi menghadapi akibat perang, bencana alam atau bencana lainnya, Perlindungan Sumber Daya dan Infrastruktur Nasional memiliki fungsi dalam jaminan daya tangkal nasional terhadap segala ancaman internal dan eksternal. Sishankamrata menempatkan masyarakat sebagai komponen pertahanan yang terlibat baik sebagai cadangan maupun pendukung dalam suatu kondisi perang, bencana maupun krisis.

Berdasarkan konsep Sistem Pertahanan dan keamanan yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, maka dirumuskanlah sistem Trigatra dan Pancagatra (Dephan, 1998). Trigarta terdiri dari tiga aspek alamiah yaitu geografis, sumber daya alam dan jumlah penduduk. Sedangkan Pancagatra terdiri dari lima aspek sosial dan ekonomi. Trigarta dan Pancagatra berhubungan yang satu sama lain dan saling tergantung untuk menciptakan kemandirian nasional. Pada dasarnya, ketahanan nasional sangat dipengaruhi oleh negara dan kapabilitasnya. Kemampuan yang digambarkan dalam konteks ini mencakup kecakapan untuk memanfaatkan trigatra atau gatra alam. Ketahanan nasional diartikan sebagai suatu pemahaman yang holistik, inklusif dan terpadu. Artinya, ada keterkaitan antar-gatra dalam kehidupan nasional. Dengan kata lain, kelemahan pada satu gatra dapat menyebabkan lemahnya gatra yang lain. Hal ini dapat berpengaruh pada kondisi secara keseluruhan (Krisnawati, 2021).

Salah satu aspek yang sangat penting dalam pancagatra adalah ekonomi. ekonomi memegang peranan penting dalam menunjang kesejahteraan masyarakat secara luas sehingga terciptanya keamanan dan ketentraman. Menurut Sen dalam (Muchaqi, 2019), pencapaian kemakmuran ekonomi dan kebebasan material tidak berhubungan, tetapi semua aspek kehidupan termasuk keamanan kolektif (negara), yang banyak diabaikan oleh para ekonom. Pertahanan negara yang kuat harus didukung oleh ekonomi yang kuat, sehingga peran ekonomi tidak dapat dipisahkan dalam mendukung pertahanan negara. Aspek ekonomi merupakan aspek yang fundamental bagi Bidang Pertahanan dalam menjalankan misinya. Berdasarkan penjelasan bahwa ekonomi mempengaruhi sishankamrata, maka peneliti ingin mengetahui bagaimana peranan ekonomi dalam implementasi sishankamrata di Indonesia berperan dalam dinamika potensi ancaman terhadap negara secara keseluruhan. Kami bertujuan untuk menyelidiki dan menganalisis secara lebih rinci bagaimana hal ini terwujud. Pertahanan yang beradaptasi dengan cepat terhadap perkembangan lingkungan strategis yang sangat dinamis dan berubah dengan cepat.

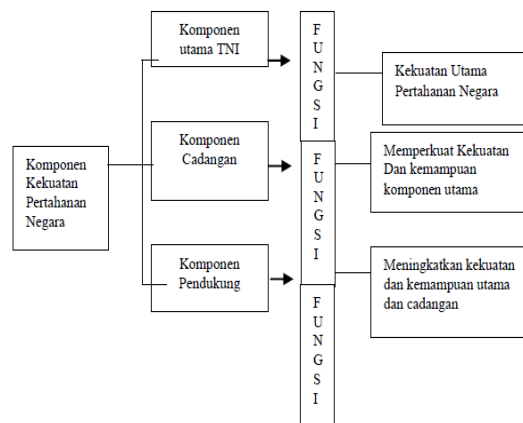
METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan sebagai sumber data utama yaitu data sekunder yang diperoleh dari literatur-literatur referensi berupa buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah dan

artikel-artikel yang berkaitan dengan topik pembahasan pada penelitian ini. Pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan teknik dokumentasi yaitu mengambil data dari penulisan terdahulu, buku-buku ilmiah, dan internet yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini. Analisis dan sintesis dilakukan dengan tiga proses yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Silalahi, 2009).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Undang-Undang Pertahanan RI No. 3 tahun 2002, menyebutkan bahwa komponen Angkatan Bersenjata dikelompokkan menjadi tiga komponen. TNI merupakan komponen utama yang siap dimobilisasikan untuk melaksanakan fungsi pertahanan nasional. Komponen cadangan adalah sumber daya nasional bukan TNI dan POLRI yang mampu dimobilisasikan untuk menambah dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen pendukung dapat dimanfaatkan untuk mendukung kekuatan dan kemampuan sumber daya komponen utama dan komponen cadangan. Pendayagunaan setiap komponen sumber daya nasional bersifat kesemestaan yang bertumpu pada Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama. Komponen Cadangan dan Pnedukung selanjutnya memegang peranan sebagai *support line* bagi komponen utama dalam fungsinya menjalankan fungsi pertahanan negara.



Gambar 1. Komponen Kekuatan Pertahanan Negara

Sistem mobilisasi seluruh sumber daya nasional dalam pertahanan ini sudah diatur dalam Undang-Undang RI No 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia sebagai sebuah Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) adalah sistem pertahanan dan keamanan yang bersifat semesta meliputi seluruh warga negara, teritori, dan sumber daya negara yang disiapkan sejak awal oleh negara dan dilaksanakan berdasarkan kedaulatan negara, serta diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu, terarah, dan berkelanjutan untuk menjaga keutuhan wilayah yang dijaga oleh entitas yang dipertahankannya. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan melindungi segenap bangsa dari segala ancaman. Sishankamrata memprioritaskan kekuatan untuk menjaga kemerdekaan dan kedaulatan NKRI, dan dengan menjamin keutuhan negara dan melakukan segala upaya untuk mencapai tujuan nasionalnya, kekuatan semua bangsa. Ini adalah upaya untuk memobilisasi dengan cara yang komprehensif dan terintegrasi.

Suwito (2017) adalah sistem pertahanan dan keamanan negara yang memiliki karakteristik kesemestaan dan bertumpu pada kerakyatan. Kerakyatan yaitu penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara dilakukan oleh rakyat dan dilaksanakan untuk menjaga kepentingan seluruh rakyat. Kesemestaan, yaitu memiliki ciri dalam penggunaan semua

sumber daya nasional untuk usaha pertahanan negara. Kewilayahan dapat dilihat melalui gelar kekuatan pertahanan yang diselenggarakan sesuai dengan kondisi geografis NKRI sebagai negara kepulauan yang tersebar di seluruh wilayah. Pendistribusian kekuatan dalam kaitannya dengan pertahanan dan keamanan ini dioperasionalkan berkenaan dengan lingkungan strategis global yang sangat dinamis dan pola ancaman yang berubah. Ancaman terhadap pertahanan dan keamanan tidak hanya mengancam sesuatu yang berkaitan dengan militer. Atas dasar fenomena inilah makna keamanan dan pertahanan diperluas. Aktor utama masalah pertahanan tidak lagi pemerintah pusat dan masalah militer semata. Dalam penemuan fenomena ini, negara tidak lagi dijadikan sebagai aktor utama pertahanan (Fauzi, 2021).

Namun dalam praktiknya, Sishankamrata sebagai konsep primier untuk mempertahankan kedaulatan dan persatuan NKRI masih sukar untuk diimplementasikan dalam skala besar dan optimal karena beberapa faktor (Setiyawan, 2020): Pertama, Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia, dalam rangka menjaga keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sumber daya manusia memegang peranan penting, khususnya dalam bidang pembangunan. Oleh karena itu dalam melaksanakan pembangunan suatu negara perlu diketahui keadaan sumber daya manusia yang ada di wilayah tersebut; dan Kedua, Lemahnya Ketahanan Ekonomi Indonesia, perekonomian memiliki peran yang vital dalam suatu negara dikarenakan jika perekonomian tidak berjalan dengan baik maka suatu negara tidak akan mampu menjalankan perannya dengan sempurna.

Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Pengukuran kualitas sumberdaya manusia dapat dilakukan dengan mengukur seberapa besar Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), IPM terdiri dari tiga unsur pembentuk utama utama: (1) Pengetahuan; (2) umur panjang dan hidup sehat; dan (3) standar hidup layak. Menurut Badan Pusat Statistik, IPM Indonesia berada di angka 72,91 pada bulan Oktober 2022, naik 0,86 persen dari tahun lalu. Dengan pencapaian ini, IPM Indonesia masih berada dalam kategori "tinggi". Pertumbuhan IPM sempat mengalami perlambatan padat tahun 2020 yaitu 71,94 yang hanya meningkat 0,2% dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan adanya pengaruh pandemi Covid-19 yang menyebabkan pertumbuhan IPM terhambat. Namun, pengendalian pandemi Covid-19 yang berkembang dengan baik serta pemulihan ekonomi nasional yang terus berlanjut dan menguat mendukung peningkatan IPM Indonesia.

Namun menurut Siregar (2022) pada laman IDXchannel, menyebutkan bahwa IPM Indonesia menduduki peringkat 114 dari 191 negara di dunia. hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun IPM Indonesia mengalami peningkatan, namun jika dibandingkan dengan dalam *scope* dunia IPM Indonesia masih tergolong rendah. Selain itu, kesenjangan IPM antar wilayahpun masih terjadi di Indonesia dan belum banyak terjadi perubahan. Pada tahun 2010, perbedaan IPM antar provinsi tercatat sebesar 21,87 poin. pada tahun 2021 angka tersebut hanya turun sedikit menjadi 20,49 poin. Meski mengalami penurunan, kesenjangan kualitas hidup warga antar lapangan usaha pada tahun 2021 tidak jauh berbeda dengan satu dekade lalu. Pola ekonomi Indonesia yang terpusat di hanya beberapa daerah provinsi saja mendorong terjadinya disparitas pembangunan ekonomi masyarakat yang tidak tersebar merata dan pada akhirnya berimbas pada ketidak merataan pembangunan kualitas sumber daya manusia. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Chalid (2014), yang menyebutkan faktor sosial ekonomi sangat mempengaruhi peningkatan derajat nilai dari Indeks Pembangunan Manusia. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap IPM. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu provinsi, maka semakin meningkat pula IPM dari provinsi tersebut.

Pertumbuhan ekonomi sebagai stimulus untuk rangsang pembangunan seperti bidang pendidikan dan bidang kesehatan serta sebagai alat utama dalam mengatasi disparitas sosial dan ekonomi. Pemerintah telah melakukan Alokasi dana untuk IPM sebagai bentuk tanggungjawab politik yang telah diamanatkan rakyat melalui beberapa bentuk legitimasi hukum pusat dan daerah. Berdasarkan Pasal 31(4) UUD 1945 dan Pasal 49(1) UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pemerintah daerah harus menyediakan anggaran untuk pendidikan sebesar 20% dari APBD. Selanjutnya Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pemerintah daerah telah diamanatkan untuk menyediakan setidaknya sepuluh persen (10%) dari APBD untuk layanan kesehatan diluar gaji pegawai. Pada Undang-Undnag No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pemerintah daerah diwajibkan untuk membelanjakan paling sedikit 40% dari seluruh belanja APBD untuk belanja infrastruktur pelayanan publik melalui belanja bagi hasil dan/atau transfer ke daerah dan/atau desa. Pemerintah daerah harus memenuhi belanja yang diamanatkan sesuai dengan berbagai peraturan perundang-undangan sebagai bentuk keseriusan kepala daerah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah masing-masing. Diukur dari Indeks Pembangunan Manusia (Kementerian Keuangan, 2023). Belanja Pemerintah ini diharapkan dapat membawa pembangunan infrastruktur pendidikan, kesehatan dan ekonomi yang akhirnya nanti dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia.

Lemahnya Ketahanan Ekonomi Indonesia

Indonesia memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara lainnya. Menurut data Bank Dunia, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia diprediksi akan mencapai \$1,19 triliun pada tahun 2021. Nilai ini merupakan yang terbesar jika dibandingkan dengan 9 negara ASEAN lainnya. Nilai PDB Indonesia pada tahun 2021 juga akan menjadi sepertiga dari PDB ASEAN, dengan total mencapai USD 3,3 triliun (Kusnandar, 2022). PDB Indonesia ditopang oleh konsumsi agregat yang besar sebab jumlah penduduk Indonesia merupakan negar yang besar. Namun PDB Indonesia yang besar ini tidak diimbangi dengan Pertumbuhan yang sifatnya inklusif. pertumbuhan ekonomi yang tidak inklusif ini mnyebabkan terjadinya kesenjangan ekonmi dimasyarakat.

Menurut Muchaqqi (2019), menyebutkan bahwa kondisi kesenjangan sosial ekonomi secara kualitatif berdampak pada Sishankamrata. Hal tersebut dapat dimaknai bahwa ekonomi menjadi salah satu aspek pada pancagarta yang penting untuk dicermati dalam pelaksanaan Sishankamrata sebagai strategi pertahanan Indonesia. Berdasarkan data dari Databoks (2022), menyebutkan bahwa Ekonomi Indonesia tumbuh 5,23% pada semester pertama tahun 2022 dibandingkan dengan semester pertama tahun sebelumnya (kumulatif vs. kumulatif/c-to-c), sebagian besar didukung oleh konsumsi domestik. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), PDB Indonesia akan mencapai Rp 4,92 triliun pada kuartal kedua tahun 2022, dimana Rs 51,7 triliun di antaranya berasal dari konsumsi masyarakat. Berdasarkan data tersebut dapat dikatakan bahwa ekonomi Indonesia menjadi negara dengan ekonomi terbesar di asia tenggara menurut Databoks. Namun, menurut Databoks (2022), pendapatan per kapita Indonesia masih berada di urutan ke-5 dari 10 negara anggota Association of Southest Asian Nation (ASEAN). Hal ini membuktikan bahwa distribusi pendapatan masih belum merata. Menurut data dari CNBC (2023), tingkat kemiskinan di Indonesia adalah 9,57% per September 2022, atau 26,36 juta orang hidup di bawah garis kemiskinan. Angka ini meningkat sedikit dibandingkan Maret 2022 (9,54%), namun lebih rendah dibandingkan angka kemiskinan pada

September 2021 (9,71%). Kesenjangan pendapatan menyebabkan disparitas sosial antara masyarakat dan pada akhirnya akan berimbas pada kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Upaya dilakukan dalam menurunkan tingkat ketimpangan ekonomi dalam mengatasi masalah inklusifitas yang dilakukan oleh pemerintah supaya ekonomi lebih berkualitas. Bentuk solusi riil salah satunya yang diberikan pemerintah berupa pemberian subsidi atau bantuan kepada masyarakat. Fungsi subsidi ini adalah untuk menstimulus ekonomi kelas bawah untuk dapat berkembang sehingga dapat mengurangi jurang disparitas ekonomi. Pemerintah diharapkan membuat program-program pembangunan yang mampu menciptakan peluang usaha baru untuk golongan kelas ekonomi bawah dalam bentuk padat modal dan padat karya. Hal tersebut bermaksud untuk meningkatkan kesempatan kerja dan menimbulkan peluang ekonomi baru dimasyarakat kelas bawah. Penguatan ekonomiyang berbasis pada rakyat dengan mendorong industri kecil yang strategis sehingga kebijakan situmus ekonomi lebih tepat sasaran pada kelas menengah kebawah dalam tujuan peningkatan kualitas ekonomi.

KESIMPULAN

Sishankamrata merupakan sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh unsur sumber daya negara sebagai komponen pertahanan. Sishankamrata memosisikan TNI sebagai unsur utama dalam melaksanakan fungsi pertahanan dan menempatkan rakyat sebagai unsur cadangan dan pendukung fungsi TNI. Implementasi Sishankamrata masih terhambat dengan adanya kualitas sumber daya manusia yang kurang dan lemahnya ketahanan ekonomi Indonesia. Dalam kaitanya permasalahan pertama, Pada dasarnya peningkatan kualitas sumber daya manusia sejalan dengan peningkatan ekonomi individu. Peranan pertumbuhan ekonomi sebagai stimulus untuk meningkatkan pembangunan di sektor-sektor lain seperti pendidikan dan kesehatan, serta sebagai kekuatan utama untuk mengatasi kesenjangan sosial ekonomi. Pemerintah telah melakukan Alokasi dana untuk IPM sebagai bentuk tanggungjawab politik yang telah diamanatkan rakyat melalui beberapa bentuk legitimasi hukum pusat dan daerah. Kedua, untuk mengatasi lemahnya ekonomi Indonesia peran dari ekonomi salah satunya yang diberikan pemerintah berupa pemberian subsidi atau bantuan kepada masyarakat. Fungsi subsidi ini adalah untuk merangsang ekonomi kelas bawah untuk dapat berkembang sehingga dapat mengurangi jurang disparitas ekonomi. Ekonomi menjadi instrumen dasar dalam memperkuat sendi-sendi Sishankamrata sebagai sistem pertahanan Indonesia. Ekonomi berperan aktif dalam mendorong terwujudnya Sishankamrata yang lebih partisipatif dan berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Akmal, A., & Pazli, P. 2015. *Strategi Indonesia Menjaga Keamanan Wilayah Perbatasan Terkait Konflik Laut Cina Selatan pada Tahun 2009-2014*. Universitas Riau.
- Chalid, Nursiah & Yusuf, Yusbar. 2014. *Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Upah Minimum Kabupaten/Kota Dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Riau*. Jurnal Ekonomi. Volume 22, Nomor 2, Hal. 1-12.
- Dephan. 1998. *Strategi Penangkalan Pertahanan Keamanan Negara*. Dephan. Jakarta.
- Fauzi, Ricky. 2021. *Role of Regional Autonomy In The Indonesian National Defense And Security System (Sishankamrata)*. Journal of Law and Legal Reform (2021), 2(1), pp. 15-38. DOI<https://doi.org/10.15294/jllr.v2i1.40905>ISSN.
- Hardiyanto, Yuda. 2023. APBD dan Keberpihakannya pada Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Kementrian Keuangan. <https://djjpb.kemenkeu.go.id/kppn/lubuksikaping/id/data-publikasi/artikel/3078->

[apbd-dan-keberpihakannya-pada-peningkatan-indeks-pembangunan-manusia.html](#).

Diakses pada 23 Februari 2023 pukul 10:13.

- Kisnawati, Ega. 2021. Apa Saja Aspek Trigatra dan Pancagatra dalam Wawasan Nusantara?. Tirto.com. <https://tirto.id/apa-saja-aspek-trigatra-dan-pancagatra-dalam-wawasan-nusantara-gaZQ>. Diakses pada tanggal 21 Februari 2023 pukul 10:40.
- Kusnandar, Viva. 2022. *Ekonomi Indonesia Masih Terbesar di ASEAN sampai 2021*. Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/17/ekonomi-indonesia-masih-terbesar-di-asean-sampai-2021>. Diakses pada tanggal 21 Februari 2022 pukul 18:44.
- Muchaqqi, Amar dkk. 2019. *Dampak Ketimpangan Sosial Ekonomi Terhadap Sistem Pertahanan Dan Keamanan Rakyat Semesta (Studi Kasus Di Kawasan Muara Angke)*. Jurnal Ekonomi Pertahanan. Volume 5 Nomor 2 Hal. 245-274.
- Putri, Aulia. 2023. *Rasio Gini RI Turun, Tapi Kemiskinan di Kota & Desa Naik*. CNBC. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230117094619-4-406014/rasio-gini-ri-turun-tapi-kemiskinan-di-kota-desa-naik>. Diakses pada 21 Februari 2023 pukul 19:27.
- Rusfiana, Yudi. 2021. *Aktualisasi Sistem Pertahanan Rakyat Semesta (Sishanta) Dan Dinamika Potensi Ancaman*. Jurnal Moderat, Volume 7, Nomor 3. Hal. 483-492.
- Setiyawan, Wahyu. dkk. 2020. *Optimalisasi Sishankamrata Melalui Penerapan Lima Pilar Total Defence Sebagai Upaya Mewujudkan Negara Indonesia*. Jurnal Borneo Law Review Vol.4 No.2. Hal 155-167.
- Siregar, Wahyudi. 2022. *Susut 0,004, IPM Indonesia Peringkat 114 dari 191 Negara di Dunia*. IDXChnammell. <https://www.idxchannel.com/economics/susut-0004-ipm-indonesia-peringkat-114-dari-191-negara-di-dunia>. Diakses pada 22 Februari 2023 pukul 21:52.
- Suwito, Anton. 2017. *Sishankamrata Sebagai Upaya Peningkatan Ketahanan Nasional Indonesia*. Seminar Nasional Ke-Indonesiaan II Tahun 2017. Hal. 138-151.
- Ulber, Silalahi. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia Pasal 1 Ayat (1).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Indonesia